

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Cyntia Ridhayana¹, Wiene Surya Putra²

STAI Syekh H. Abdul Halim Hasan Al-Ishlahiyah, Binjai, Indonesia

Email: ridhayanacyntia@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN.3026-6874 Vol. 1, Nomor. 2, Desember 2023 Halaman : 789-798	<i>This research aims to describe the process of policies implementation including education policies. This research is a qualitative research which is library research. Research data in the form of library data, especially some books about the implementation of educational policies. Then the data collected was selected, presented and analyzed using content analysis. The results of this reseach show that "implementation" is the most important factor of a policies. The implementation of education policies is a process that related with the behavior of administrative institutions as the ones responsibility for implementation of program. The implementation process also related with legal, political, economic, social factors that directly or indirectly affect the behavior of various parties involved in the program. In implementing policies there are processes must be passed, including certain strategies and approaches that must be taken, as well as some completeness and adequacy that must be met. This is only for the sake of realizing success in implementing of policies.</i>
Keywords: Implementation Policy Education	

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Data penelitian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil kajian menunjukkan bahwa "implementasi" merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkutan paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkutan paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pendidikan

PENDAHULUAN

Analisis kebijakan merupakan suatu serangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan. Ducan macrae menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu social terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah public (Mulyati, 2021).

Yang melatarbelakangi kebijakan pendidikan adalah terdapatnya permasalahan dari pendidikan itu sendiri. Masalah yang terjadi dalam kebijakan pendidikan timbul karena terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pendidikan yang telah dibuat oleh penyelenggara pendidikan dengan pelaksana kebijakan pendidikan. Proses implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting dikarenakan akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil selalu pada tahap implementasi. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang dinamis dimana ketika pelaksanaan kebijakan akan menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dari kebijakan tersebut.

Hasbullah (2015) mengatakan tujuan dari implementasi kebijakan adalah agar tujuan dari kebijakan dapat tercapai dan terimplikasikan. Ketika melakukan proses implementasi kebijakan pendidikan ada beberapa tahap yang perlu dilakukan, serta pendekatan dan langkah-langkah yang

ditempuh. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan keberhasilan dari implementasi kebijakan, dan juga kebijakan dalam bidang pendidikan.

Konsep pendidikan di Indonesia sendiri sudah ada dalam pembukaan UUD 1945 dengan kalimat "mencerdaskan kehidupan bangsa". Kalimat ini memiliki arti bahwa pendidikan adalah salah satu jalan untuk mencerdaskan generasi muda bangsa Indonesia. Dan juga di Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa "Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa guna mencerdaskan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat berakhlak mulia, cakap, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis."

Dalam melakukan proses implementasi kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan bisa jadi lebih penting dibandingkan dengan proses penyusunan kebijakan pendidikan itu sendiri, sebab dalam proses implementasi kebijakan menjadi penghubung dari perumusan kebijakan dengan hasil yang telah ditetapkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menelaah bagaimana implementasi kebijakan pendidikan sehingga dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dengan implementasi kebijakan itu sendiri dengan harapan tujuan dari pendidikan tercapai.

METODE

Penelitian ini memakai studi literature atau *literature research*. Penelitian ini menggunakan artikel jurnal dan buku untuk mengumpulkan data penelitian. Pengumpulan data ini berupa data-data literature artikel jurnal yang berkaitan dengan "implementasi kebijakan pendidikan". Dan data yang telah dipilih lalu dikumpulkan kemudian dipilah, disajikan dan dianalisis serta diolah agar data menjadi ringkas dan sistematis. (Elih, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kata implementasi didalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) artinya pelaksanaan atau penerapan. Kata implementasi biasanya sering dikaitkan dengan suatu aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam kamus Webster menjelaskan bahwa *to implement* (mengimplementasikan) artinya *to provide the means for carryingout* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect* yang artinya menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. (wahab, 2008). Pengertian tersebut memiliki arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

H.A.R Tilaar menurutnya kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk meralisaikan tujuan nasional, direalisasikan atau diraih melalui lembaga-lembaga sosial (*social institutions*) atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal (Solichin, 2015).

Maka dapat kita simpulkan bahwa jika kebijakan tidak segera diimplementasikan, maka tidak akan bisa diketahui tingkat keberhasilannya bagi banyak orang. Kebijakan hanya akan menjadi rencana ide saja yang akan tersimpan rapi dalam tumpukkan arsip-arsip saja.

2. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan

Ketika merumuskan kebijakan pendidikan, pra pembuat kebijakan hendaknya memperhatikan beberapa karakteristik khusus (H.A.R and Nugroho, (2008). Adapun karakteristik yang dimaksud adalah:

- 1) Memiliki tujuan pendidikan;

- 2) Memenuhi aspek legal-formal;
- 3) Memiliki konsep operasional;
- 4) Dibuat oleh yang berwenang;
- 5) Dapat dievaluasi;
- 6) Memiliki sistematika.

Sedangkan menurut James E. Anderson yang dikutip oleh Sudiyono, bahwa implementasi kebijakan mencakup empat aspek yaitu:

- 1) Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- 2) Esensi proses administrasi;
- 3) Kepatuhan terhadap kebijakan;
- 4) Pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.

3. Tahapan Implementasi Kebijakan Pendidikan

Linberry mengatakan bahwa implementasi mencakup komponen sebagai berikut:

- 1) Pertama, menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru.
- 2) Kedua, menerjemahkan tujuan legislative dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan.
- 3) Ketiga, melakukan koordinasi terhadap sumberdaya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggungjawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen.
- 4) Keempat, mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak kebijakan.
Berbeda dengan Putt dan Springer pada Syafaruddin yang mengatakan terdapat tiga proses kebijakan, yaitu: formulasi, implementasi dan evaluasi. Ketiga proses tersebut diuraikan agar secara holistic makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan baik (Alwi, 2008).

4. Model Implementasi Kebijakan Pendidikan

Adapun model implementasi kebijakan sebagai wujud pembaharuan manajemen di satuan pendidikan menurut Yoyon antara lain mencakup:

- 1) Broad base education, life skills, dan kurikulum berbasis kompetensi (kbc);
- 2) Manajemen berbasis sekolah;
- 3) Penguatan pendidikan luar sekolah berbasis pkbm dan pkbm masyarakat;
- 4) Kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) tahun 2006;
- 5) Perguruan tinggi badan hukum milik negara menuju badan layanan umum;
- 6) Pengembangan model profesi kependidikan;
- 7) Kebijakan ujian nasional (un);
- 8) Antisipasi penolakan pembaharuan;
- 9) Kebijakan sertifikasi guru dan dosen;
- 10) Bantuan operasional sekolah (bos);
- 11) Pendidikan karakter (kurikulum 2010);
- 12) Perubahan ikip menjadi universitas;
- 13) Kurikulum berbasis sistemik integratif 2013; dan lain-lain.

Model implementasi kebijakan di bidang pendidikan diatas dalam implementasinya harus menggunakan saluransaluran komunikasi yang mendukung kelancaran suatu ide atau gagasan dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat. Ide-ide tersebut disosialisasikan dalam bentuk desiminasi skala regional maupun nasional. Usaha ini diharapkan dapat memecah kebuntuan komunikasi yang kerap kali

terjadi pada setiap kebijakan yang digulirkan sehingga menimbulkan gesekan bahkan konflik horizontal di masyarakat khususnya pemangku kepentingan di dunia pendidikan atau konflik vertikal dengan sang pembuat kebijakan hingga berujung pada ketidakpercayaan publik atas pemerintah itu sendiri. Pemerintah sebagai pemegang amanah kekuasaan dari rakyat melalui undang-undang atau aturan yang diciptakannya dapat bersama-sama rakyat secara langsung menentukan formulasi kebijakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Rencana adalah 20% keberhasilan, implementasi adalah 60%, 20% sisanya adalah bagaimana kita mengendalikan implementasi. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep, muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi (Nugroho, 2004).

Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, baik terkait dengan implementor, sumberdaya, lingkungan, metoda, permasalahan dan tingkat kemajemukan yang dihadapi di masyarakat. Sumberdaya manusia sebagai implementor mempunyai peranan yang penting dalam pengendalian implementasi kebijakan publik.

1) Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni:

a. Standar dan sasaran kebijakan.

Setiap kebijakan public harus mempunyai standard an suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujudkan. Dalam standard an sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidakbias terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.

b. Sumberdaya.

Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya materi (*matrial resources*) dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut, yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.

c. Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnyatersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

d. Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.

e. Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor ini dibedakan menjadi tiga hal, yaitu;

a) respons implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik;

b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan

c) intens disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

f. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan

2) Teori George C. Edwards III (1980)

Model implementasi kebijakan menurut pandangan Edwards III (1980), dipengaruhi empat variabel, yakni;

a. Komunikasi.

Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.

Oleh karena itu diperlukan adanya tiga hal, yaitu;

a) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula (kejelasan);

b) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, dan

c) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan.

b. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya Wahab (2010), menjelaskan bahwa sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumberdaya finansial.

c. Disposisi.

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Wahab (2010), menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d. Struktur birokrasi.

Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatankegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan.

Kebanyakan peta organisasi bersifat hirarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan dan hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal harus tergambar, yaitu;

a) Jenjang hirarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat "*Siapa yang bertanggungjawab kepada siapa?*";

- b) Pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban terhadap pertanyaan "Siapa yang melakukan apa?";
- c) Berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi sebagai jawaban terhadap pertanyaan "Siapa yang berhubungan dengan siapa dan untuk kepentingan apa?";
- d) Jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual;
- e) Hubungan antara satu satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain.

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan yang penting. Salah satu dari aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*).

Fungsi dari SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan redtape, yakni birokrasi yang rumit dan kompleks. Hal demikian pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

3) Teori Marilee S. Grindle (1980)

Menurut Grindle (1980), bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua variabel yang fundamental, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

a. Variabel isi kebijakan.

Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu;

- a) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan publik;
- b) jenis manfaat yang diterima oleh target group;
- c) sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh kebijakan. Dalam suatu program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku kelompok sasaran relatif lebih sulit diimplementasikan daripada sekedar memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada sekelompok masyarakat miskin;
- d) apakah letak sebuah program sudah tepat;
- e) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci; dan
- f) sumberdaya yang disebutkan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

b. Variabel lingkungan kebijakan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut;

- a) seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan;
- b) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa;
- c) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

4) Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

a. Karakteristik masalah:

- a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan, seperti kekurangan persediaan air minum bagi penduduk atau harga beras tiba-tiba naik. Di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang sulit dipecahkan, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi dan sebagainya. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan mempengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan.
- b) Tingkat kemajemukan kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya homogen. Sebaliknya, apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program akan relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran program relatif berbeda.

- c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya tidak terlalu besar.
- d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan mengubah sikap dan perilaku masyarakat. Sebagai contoh, implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sulit diimplementasikan karena menyangkut perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas.
- b. Karakteristik kebijakan:
 - a) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.
 - b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat yang lebih mantap karena sudah teruji, walaupun beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi.
 - c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya itu perlu biaya.
 - d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
 - e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Kasus korupsi yang terjadi di negara-negara dunia ketiga, khususnya Indonesia salah satu sebabnya adalah rendahnya tingkat komitmen aparat untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-program
 - g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat. Masyarakat akan merasa terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.
- c. Lingkungan kebijakan:
 - a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan teknologi modern.
 - b) Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat disinsentif seperti kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) atau kenaikan pajak akan kurang mendapat dukungan publik.
 - c) Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain;
 - (a) kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan;

- (b) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan - badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan -badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
- d) Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.

5. Pengukuran Implementasi Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pada hakekatnya berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi menggunakan pola formal yang sama sama diterima pemerintah/lembaga terkait sehingga semua pihak berusaha mengejar tercapainya tujuan yang ditetapkan (Monahan dalam Syafaruddin, 2008).

Adapun Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan mencapai tujuan didasarkan pada tiga aspek, yaitu:

- 1) tingkat kepatuhan birokrasi pendidikan terhadap birokrasi yang lebih tinggi di atasnya atau tingkatan birokrasi pendidikan sebagaimana sudah diatur dalam undang -undang,
- 2) kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah yang dihadapi; serta
- 3) dampak (manfaat) yang dikehendaki dari program pendidikan yang dilaksanakan terarah.

Disamping itu, ada variabel lain yang berkontribusi memberikan dorongan dan paksaan dari birokrasi pendidikan pada level pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitasnya, yakni semakin sah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah. pusat di mata daerah, maka semakin besar pula kredibilitasnya, atau sebaliknya.

Selain kriteria pengukuran terhadap implementasi kebijakan di atas, perlu juga dipahami hubungan dan/atau pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lainnya. Hal ini selaras dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn bahwa terdapat beberapa variabel yang saling berhubungan dalam keberhasilan implementasi kebijakan meliputi:

- 1) ukuran dan tujuan kebijakan,
- 2) sumber kebijakan,
- 3) ciri sifat dan karakteristik badan/ instansi pelaksana kebijakan,
- 4) komunikasi kegiatan antar organisasi terkait,
- 5) sikap para pelaksana, dan
- 6) lingkungan ekonomi, sosial dan politik,

Disamping itu, Ripley (1986) menjelaskan beberapa indikator untuk menilai kualitas policy output, yaitu: cakupan, bias, akses, frekuensi, *service delivery* (ketepatan layanan), akuntabilitas, dan kesesuaian program dengan kebutuhan. Indikator *policy outcomes* digunakan untuk mengukur hasil implementasi suatu kebijakan. Hasil atau dampak kebijakan pada dasarnya berkaitan dengan perubahan kondisi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran kebijakan atau program, yaitu dari kondisi awal yang tidak dikehendaki (kemiskinan, kondisi kesehatan yang buruk, dan lainlain) menuju kondisi baru yang lebih dikehendaki (lebih sejahtera, lebih sehat, dan lain-lain). Indikator *policy outcomes* yang digunakan dalam penulisan ini adalah (1) *initial outcome* atau hasil awal dari keluaran kebijakan, (2) *intermediate outcome* atau hasil jangka menengah, dan (3) *long-term outcome* atau hasil jangka panjang (Purwantodan Sulistyastuti, 2012)

Ada banyak faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, antara lain faktor disposisi implementor dan format kebijakan. Disposisi implementor ini dipahami sebagai perilaku implementor yang berkenaan dengan ketersediaan implementor untuk *carry out* terhadap sebuah kebijakan. Disposisi implementor dapat memengaruhi implementasi sebuah kebijakan. Seperti diungkapkan

Edwards III (1980): *"If implementation is to proceed effectively, not only must implementers know what to do it, but they must also desire to carry out a policy"*. Hal serupa diungkapkan Wagner (2008), menyebutkan implementor memegang peran penting dalam keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan (*some say attitude is everything and, when considering program implementation, the disposition of implementers provides the lightning rod for success or failure*)

Pengukuran kebijakan, Goggin et.al. dalam Purwanto terdiri; kejelasan kebijakan (*policy clarity*), konsistensi kebijakan (*policy consistency*), *frequency*, serta penerimaan isi kebijakan (*receipt of message*). Pada konteks ini, fokus implementasi kebijakan bisa dilihat dari konsistensi kebijakan (*policy consistency*) dan kejelasan kebijakan (*policy clarity*). Wagner menyatakan kejelasan dan konsistensi kebijakan adalah hal yang mendasar dalam implementasi kebijakan. senada dengan itu, Chustz and Larson dalam Wagner menyatakan keharusan konsistensi dan kejelasan kebijakan sebagai konsep dasar dalam implementasi kebijakan *reviewed the basic concepts of the implementation and found the initial concept stated that the policy must be clear and consistent*. This will eliminate the distractions that will come as the program moves from the planning stage to the implementation stage and more stakeholders take part in interpreting the concepts and building the implementation (Arwildayanto, 2018).

KESIMPULAN

Implementasi merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan yang dilakukan, termasuk dalam hal ini kebijakan dalam bidang pendidikan. Implementasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, merupakan proses yang bersangkutan paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan menimbulkan ketaatan pada kelompok sasaran. Proses implementasi bersangkutan paut pula dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui, strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini semata demi mewujudkan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Demikian pula halnya kebijakan dalam bidang pendidikan.

REFERENCES

- Alwi, Syafaruddin. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi Keunggulan Kompetitif*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Arwildayanto, dkk. 2018. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. CV. Cendekia Press: Bandung.
- H.A.R, Tilaar, dkk. 2012. *Kebijakan Pendidikan, Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasbullah. 2015. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyati, N. 2021. *Analisis Kebijakan Pendidikan Terkait Implementasi Pembelajaran Jarak Jauh pada Masa Darurat Covid-19*. Jurnal Sosial Teknologi. 1(9). doi:10.36418/jurnalsostech.v1i9.191
- Nugroho, Riant Dwijowijoto. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ripley, R. B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. California: Wadsworth Publishing Company.
- Solichin, M. 2015. *Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi*. Jurnal Studi Islam, 6(2).
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Wahab, S. A. 2008. *Analisis Kebijaksanaan; Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Yuliah, E. 2020. *Implementasi Kebijakan Pendidikan (The Implementation Of Educational Policies)*. Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan. 30 (2).